

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 8



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Suara Merdeka	Jateng Pos	Jawa Pos	Media Indonesia	Wawasan
Tribun Jateng	Metro Jateng	Republika	Kompas	Media Online

Wilayah Berita: Kabupaten Semarang

Halaman 27

Empat Parpol Diminta Perbaiki Laporan

Dana Kampanye

UNGERAN - KPU Kabupaten Semarang meminta empat partai politik (parpol) untuk memperbaiki laporan awal dana kampanye (LADK) yang sebelumnya diserahkan ke lembaga penyelenggara pemilu tersebut.

Keempat parpol tersebut adalah PPP, PAN, PSI, dan PBB. Perbaikan perlu dilakukan karena ada beberapa dokumen persyaratan yang dinilai kurang. "Untuk perbaikan LADK diberi waktu, mulai 23-27 September 2018," kata Komisioner KPU Kabupaten Semarang, Divisi Perencanaan dan Data, Maskup Asyadi, Selasa (25/9).

LADK yang diberikan masing-masing parpol besarnya terpantau beragam. Dana awal PBB tercatat paling kecil, yakni Rp 50.000. Sementara dana awal terbesar dari PDIP yakni Rp 10.001.425.

Adapun rinciannya, PKB melaporkan LADK sebesar Rp 1 juta.

Kemudian Partai Gerindra (Rp 1 juta), PDIP (Rp 10.001.425), Partai Golkar (Rp 500 ribu), Nasdem (Rp 500 ribu), Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Rp 200 ribu), Partai Berkarya (Rp 100 ribu), PKS (Rp 500 ribu), Partai Persatuan Indonesia (Rp 1 juta), PPP (Rp 500 ribu), PSI (Rp 100 ribu), PAN (1 juta), Partai Hanura (Rp 500 ribu), Partai Demokrat (1 juta), dan PBB (50 ribu).

Belum Ada Dana

Terpisah, Ketua DPC PBB Kabupaten Semarang, Nurdin Jadid membenarkan bila LADK yang dilaporkan ke KPU sebesar Rp 50 ribu. Alasannya, karena belum ada dana maupun sumbangan yang masuk dari internal parpol.

"Itu uang saya sendiri, menyusul sampai sekarang memang

belum ada dana yang masuk," ujarnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Divisi Penindakan Pelanggaran, Agus Riyanto menandatangani, hingga kemarin di Kabupaten Semarang belum ditemukan sengketa Pemilu.

Ia menyarankan, kepada seluruh parpol untuk berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, dan Polri terkait rencana kegiatan yang akan dilakukan.

Tujuannya, agar penyelenggara maupun pengawas bisa mengantisipasi hal-hal yang mengarah ke pelanggaran. "Dengan demikian, tidak ada sidang sengketa di pengadilan. Tidak seperti di wilayah lain. Kalau pun tidak ada pelanggaran, itu keberhasilan kita semua," tandasnya. (H86-22)